



SETELAH LAPAS MEWAH CIBINONG DIBONGKAR

Pungli di Rutan Pondok Bambu: Pakai HP Bayar Rp250 Juta

Suara alat berat ekskavator terdengar di kompleks Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026). Satu per satu bangunan yang selama sepekan terakhir menjadi sorotan karena dilengkapi fasilitas layaknya hunian mewah mulai diratakan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebut ada 10 unit bangunan yang dibongkar dan ditargetkan seluruhnya selesai pada hari yang sama. Sebelum tembok dirubuhkan, petugas mengeluarkan berbagai barang dari dalam hunian. Televisi berukuran besar, kulkas, dispenser, pendingin ruangan, kasur, dipan, meja, jemuran, sofa, alat olahraga hingga mainan anak juga ikut dikeluarkan. Pembongkaran itu sekaligus menjadi penutup sementara dari rangkaian temuan yang bermula ketika Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. Akademisi dan pengamat berharap ini bukan akhir dari penegakan keadilan. Dugaan korupsi terorganisir, dengan kemungkinan adanya pola transaksi dan aliran uang secara berjenjang pun mencuat. Penelusuran tidak boleh berhenti pada siapa yang menggunakan ruangan, tetapi juga harus mencari pihak yang mengatur, menerima, atau menikmati aliran uangnya. Ironisnya, kegaduhan Cibinong belum usai, Ombudsman mengungkap fakta megejutkan lainnya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur. Warga binaan diduga harus membayar pungutan liar (pungli) Rp250 juta apabila ingin menggunakan telepon seluler atau handphone di dalam rutan. Menengok kebelakang, Cibinong dan Pondok Bambu bukan cerita pertama soal 'kenakalan' di lokasi yang seharusnya menjadi hukuman para narapidana. Setidaknya sejak 2013, ketika Lapas Narkotika Cipinang menjadi sorotan setelah terungkap adanya ruangan khusus yang digunakan untuk menerima tamu warga binaan. Ruangan itu dikaitkan dengan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman. Pada Mei 2017, penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang BNN kembali menemukan sel yang tidak seperti kamar narapidana pada umumnya. Sel yang ditempati Haryanto Chandra alias Gombak dilengkapi AC, CCTV, Wi-Fi, akuarium ikan arwana dan menu makanan khusus. Di dalamnya juga ditemukan laptop, iPad, empat telepon seluler dan token. BNN bahkan menemukan aktivitas penggunaan sabu di dalam sel saat penggeledahan. Setahun kemudian, persoalan serupa muncul dengan konsekuensi hukum yang jauh lebih jelas di Lapas Sukamiskin. Dalam OTT pada Juli 2018, KPK menemukan sel dengan fasilitas seperti AC, kulkas dan televisi. KPK menyebut ada pemberian uang dan fasilitas kepada Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein untuk memperoleh perlakuan khusus, termasuk fasilitas kamar dan kemudahan keluar lapas. KPK saat itu menyebut nilai pembayaran untuk fasilitas kamar berada pada kisaran Rp200 juta hingga Rp500 juta. BERSAMBUNG HAL.11

LAPAS CIBINONG (2026)

Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan dengan fasilitas seperti apartemen: AC, TV, kulkas, sofa, gym hingga simulator golf. 5 pejabat dinonaktifkan dan penyelidikan masih berlangsung.

SUKAMISKIN KEMBALI DISOROT (2019)

Ombudsman menemukan lebih dari 10 bangunan dengan fasilitas seperti apartemen: AC, TV, kulkas, sofa, gym hingga simulator golf. 5 pejabat dinonaktifkan dan penyelidikan masih berlangsung.

LAPAS SUKAMISKIN (2018)

KPK membongkar jual-beli kamar dan fasilitas khusus. Kamar tertentu dilengkapi AC, TV, kulkas, hingga fasilitas tambahan. Biaya kamar disebut Rp200-500 juta.

LAPAS CIPINANG (2017)

-Kasus: BNN menemukan sel Haryanto Chandra alias Gombak dengan fasilitas tidak lazim.

-Fasilitas: AC, CCTV, Wi-Fi, akuarium ikan arwana, laptop, iPad, 4 HP dan token.

-Temuan lain: Penyidik menemukan aktivitas penggunaan sabu di dalam sel.

Tindakan: BNN menyatakan akan meminta keterangan Kalapas Cipinang. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyebut perkara fasilitas tersebut berakhir dengan vonis pejabat lapas.

JEJAK LAPAS MEWAH DI INDONESIA

AKHIR KASUS FREDDY (2016)

-Freddy Budiman dieksekusi mati di Nusakambangan pada 29 Juli 2016

-Namun, persoalan fasilitas khusus di Cipinang kembali mencuat setahun kemudian.

LAPAS CIPINANG (2013)

-Kasus: Ruangan khusus digunakan untuk menerima tamu warga binaan, dikaitkan dengan terpidana narkoba Freddy Budiman.

Tindakan: Kalapas Thurman Hutapea dicopot dan diberhentikan sebagai PNS karena dinilai lalai.

Akhir: Gugatan Thurman dikabulkan, sehingga pemberhentiannya dibatalkan.

Sumber Data : Berbagai Sumber Diolah



Deretan bangunan yang disebut sebagai klaster berfasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, dibongkar pada Rabu (30/9/2026). (ist.ant)

KISARAN JUMLAH
JEMAAH UMRAH INDONESIA

2018

Hampir 1 juta jemaah/tahun

2022

1.402.629 jemaah

2023

1.227.747 jemaah

2024

Sekitar 1,4 juta melalui PPIU, sementara data Saudi mencatat sekitar 1,8 juta

2025

648.485 jemaah baru sampai 13 April

2026

sekitar 200 ribu jemaah per bulan menurut Kemenhaj



PEMERINTAH SIAPKAN BATAS BAWAH UMRAH RP27 JUTA

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan standar harga batas bawah perjalanan umrah sekitar Rp27 juta per jemaah. Kebijakan itu muncul di tengah tingginya arus jemaah Indonesia ke Tanah Suci dan masih ditemukannya pengaduan terkait penipuan serta penggelapan dana perjalanan.

Sejumlah calon jemaah umrah berjalan sebelum menaiki pesawat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (Dok.illustrasi)



akomodasi hingga konsumsi jemaah.

Kebutuhan pengawasan juga tercermin dari pengaduan yang masuk. Hingga September 2026, Kemenhaj mencatat 189 pengaduan terkait perjalanan haji dan umrah dengan modus yang relatif sama, yakni penipuan dan penggelapan dana. Dari angka tersebut, 74 pengaduan berkaitan dengan haji dan 93 dengan umrah. Data yang dihimpun Kemenhaj dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menunjukkan sekitar 400 pengaduan pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar 500 pada 2024.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj Ahmad Abdullah mengatakan pengawasan diarahkan untuk melindungi hak jemaah, mencegah penyimpangan, memastikan kepatuhan penyelenggara, menjaga mutu layanan, serta menangani persoalan yang muncul. Dalam penanganan pengaduan, Kemenhaj mengedepankan edukasi dan mediasi. Jika persoalan tidak dapat diselesaikan, kasus dapat diserahkan kepada kepolisian.

"Tugas kami melakukan pengawasan ini salah satunya adalah untuk pertama melindungi hak jemaah, kemudian mencegah penyimpangan, ketiga menjamin kepatuhan dan aturan dari penyelenggara, menjaga mutu layanan, serta menangani masalah bila ada," ujar Ahmad.

Persoalan legalitas travel menjadi perhatian lain. Kemenhaj mencatat 3.631 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH). Namun, sekitar 50

persen di antaranya berstatus tidak aktif. Sebagian diblok karena belum melakukan sertifikasi, sementara sebagian lainnya masih dalam proses harmonisasi data.

Fauzin meminta calon jemaah tidak hanya melihat harga ketika memilih travel. Legalitas, masa aktif izin dan rekam jejak penyelenggara perlu diperiksa sebelum pembayaran dilakukan.

"Pertama adalah perizinannya, kemudian masa aktifnya mulai kapan. Nah, itu adalah bagian dari track record travel jadi kita bisa tahu bagaimana rekam jejak travel tersebut," katanya.

Pengawasan juga diperluas ke layanan yang dijanjikan travel. Kemenhaj meminta PPIU mencantumkan hotel secara jelas dan melarang penggunaan istilah "hotel setara" dalam penawaran. Jika menjanjikan hotel bintang tiga, misalnya, nama hotel yang akan digunakan harus disebutkan. Di dalam negeri, Kemenhaj juga membuka posko pengawasan di Terminal 2F untuk memantau pemberangkatan jemaah dan memastikan layanan sesuai regulasi.

Siapkan Staf Teknis di Tanah Suci

Pengawasan jemaah umrah juga akan diperkuat langsung di Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan pembentukan staf teknis bidang umrah yang nantinya ditempatkan di Makkah, Madinah, dan Jeddah.

Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Ahmad Abdullah, mengatakan staf tersebut diperlukan agar persoalan yang dialami jemaah di Tanah Suci dapat segera ditangani. Usulan itu

disampaikan dalam media briefing di Kantor Kemenhaj, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

"Kita juga mengusulkan ke depannya ada staf teknis bidang umrah dengan beberapa orang pelaksana yang akan melakukan pengawasan di Tanah Suci di Makkah, Madinah, maupun di Jeddah," kata Ahmad.

Menurut dia, keberadaan staf teknis dibutuhkan antara lain ketika jemaah telantar, tidak dapat kembali ke Indonesia, atau tidak memperoleh layanan yang sesuai dengan kontrak perjalanan yang dijanjikan PPIU.

"Kalau kejadian di Arab Saudi ada jemaah yang telantar atau tidak bisa pulang atau mungkin layanannya tidak sesuai dengan kontrak yang dikelola oleh travel-travel, itu nanti bisa segera ditangani," ujar Ahmad.

Usulan tersebut melengkapi pengawasan yang dilakukan di dalam negeri. Kemenhaj telah membuka posko pengawasan di Terminal 2F yang melibatkan tim Bina Haji Khusus dan Umrah serta Direktorat Perizinan dan Akreditasi. Posko itu digunakan untuk mengontrol pemberangkatan sekaligus membina PPIU.

Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kemenhaj, Akhmad Fauzin, mengatakan pengawasan diperlukan agar jemaah memperoleh layanan sesuai ketentuan. Transparansi informasi akomodasi menjadi salah satu yang disoroti.

"Harus jelas di sana hotelnya atau akomodasinya seperti apa. Bintang tiga itu harus disebutkan hotelnya, tidak boleh setara atau setara bintang tiga. Di Makkah-nya misalnya menggunakan hotel apa, harus disebut," kata Fauzin.

Sementara itu, fenomena umrah mandiri juga menjadi perhatian. Fauzin mengatakan mekanisme umrah mandiri memiliki ketentuan, antara lain melalui sistem Nusuk Masar dengan batas maksimal delapan orang dalam satu kelompok. Masyarakat juga diminta menggunakan layanan pengaduan Kemenhaj untuk memeriksa penyelenggara sebelum menyerahkan pembayaran. (gus,rls,dtc/dya)

RUU LLAJ MASUK PEMBAHASAN, NASIB OJOL HINGGA TRUK ODOL JADI SASARAN

Pemerintah dan DPR mulai membahas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Rabu (30/9/2026). Revisi ini membawa sejumlah isu baru yang belum terakomodasi dalam aturan lama, mulai dari transportasi berbasis aplikasi, tarif dan kuota ojol, penindakan kendaraan over dimension over loading (ODOL), hingga kendaraan listrik dan kendaraan otonom.



(Ilustrasi) Sejumlah pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. (dok)

SISTEM PENDAPATAN OJOL

- **Skema dasar:** tarif perjalanan dibayar pelanggan → aplikasi mengambil biaya jasa/komisi → sisanya menjadi pendapatan pengemudi.
- **Mulai 1 Juli 2026:** komisi Gojek dan Grab untuk layanan penumpang roda dua ditetapkan 8%.
- **Sebelumnya:** biaya jasa aplikasi maksimal 15%, dengan biaya penunjang maksimal 5%.
- **Maxim:** pada Juni 2026 menyebut komisi masih bervariasi 8-15%, tergantung layanan dan wilayah.
- **Besaran pendapatan pengemudi** dipengaruhi jumlah order, jam kerja, wilayah, insentif, dan biaya operasional.

PENDAPATAN PENGEMUDI

- **Survei Kemenhub 2022:** 50,1% responden berpendapatan Rp50-100 ribu/hari.
- **Biaya operasional:** 44,1% responden mengeluarkan Rp50-100 ribu/hari. Pendapatan kotor tidak sama dengan penghasilan bersih karena masih dipotong BBM, servis, cicilan kendaraan, pulsa/data, dan biaya lainnya.
- **2026:** Gojek dan Grab memberikan Bonus Hari Raya (BHR) sekitar Rp400 ribu kepada pengemudi yang memenuhi syarat. Karena statusnya mitra, tidak ada standar gaji bulanan tunggal seperti pekerja formal.

JUMLAH PENGEMUDI OJOL MENURUT PERUSAHAAN OPERATOR

- **Grab**
Terdaftar: 3,7 juta | Aktif: 1 juta
- **Gojek**
Terdaftar: 3,1 juta | Aktif: 500 ribu
- **inDrive**
Terdaftar: 850 ribu | Aktif: 250 ribu
- **Maxim**
Terdaftar: 2 juta | Aktif: 800 ribu

DPR RI tersebut, pemerintah telah melakukan pembahasan dan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah secara intensif melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga," kata Dudy.

Revisi dilakukan karena perubahan masyarakat dan teknologi transportasi dinilai bergerak lebih cepat daripada regulasi. Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengatakan aturan yang berlaku perlu menyesuaikan perubahan tersebut. "Perubahan yang terjadi di masyarakat terjadi begitu cepat dan seharusnya diikuti dengan perubahan aturan hukum yang ada."

Salah satu perubahan besar menyangkut transportasi berbasis platform digital. Pemerintah menyetujui penambahan Pasal 137A yang mengatur angkutan berbasis sistem digital, termasuk angkutan sewa khusus serta penggunaan sepeda motor untuk mengangkut penumpang dan mengantarkan barang maupun makanan. Hak dan kewajiban perusahaan aplikasi serta pengemudi juga akan diatur, termasuk mekanisme tarif dan kuota layanan.

Pengaturan tersebut akan diselaraskan dengan Peraturan Presiden mengenai ojek daring yang masih disiapkan pemerintah. Dudy mengatakan proses penyusunan Perpres Ojol sudah berjalan dan nantinya perlu disinkronkan dengan ketentuan dalam UU LLAJ apabila telah disahkan.

Isu transportasi daring menjadi penting karena jumlah pengemudinya diperkirakan mencapai 2 juta hingga 4 juta orang. Syaiful mengatakan pengaturan transportasi daring roda dua dan roda empat perlu mencakup

hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi. "RUU tentang LLAJ ini harus dapat menjangkau pajak PNPB dari perusahaan aplikasi. Sistem perpajakannya harus diatur agar potensi penerimaan negara tidak hilang," ujarnya.

Pengemudi Minta Tetap Status Kemitraan

Di sisi lain, pembahasan mengenai status pengemudi ojol juga berlangsung dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR. Sejumlah komunitas pengemudi meminta status kemitraan tetap dipertahankan karena memberikan fleksibilitas, termasuk bagi pengemudi yang bekerja di lebih dari satu platform. Pada saat yang sama, terdapat aspirasi agar pekerja platform memperoleh perlindungan ketenagakerjaan yang lebih jelas. Perbedaan aspirasi itu masih menjadi bagian dari pembahasan dan belum menghasilkan ketentuan final.

Selain ojol, ODOL menjadi salah satu perhatian utama dalam revisi UU LLAJ. Pemerintah menyetujui pemberatan sanksi pidana sekaligus perluasan pihak yang dapat dikenai sanksi. Jika sebelumnya penindakan terutama menyasar pengemudi, rancangan baru membuka kemungkinan sanksi terhadap pemilik kendaraan, korporasi, hingga pemilik barang.

Pengawasan ODOL juga akan diperkuat dengan teknologi elektronik. Pemeriksaan daya angkut dan tata cara pengangkutan barang diarahkan menggunakan peralatan elektronik, termasuk mekanisme penindakan terhadap pelanggaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari

upaya memperkuat keselamatan sekaligus mengendalikan dampak kendaraan bermuatan atau berdimensi berlebih terhadap jalan dan lalu lintas.

Regulasi baru juga memperluas cakupan teknologi transportasi. Pemerintah menyetujui pengaturan kendaraan berdasarkan sumber tenaga penggerak, termasuk perkembangan kendaraan listrik, serta teknologi sistem kemudi dan kendaraan otonom. Pengaturan electronic traffic law enforcement (ETLE) juga menjadi bagian dari materi revisi.

Dalam aspek kelembagaan, pemerintah menyetujui penambahan kementerian yang memiliki peran dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dikaitkan dengan pendidikan lalu lintas, Kementerian Kesehatan dengan penanganan pascakecelakaan, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital mendapat peran terkait penyelenggaraan platform digital pada angkutan jalan. Untuk registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, kewenangan tetap berada pada Korlantas Polri.

Revisi juga menyentuh Dana Preservasi Jalan yang akan diselaraskan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Pemerintah mengusulkan pula pengaturan penyelenggaraan terminal penumpang dan barang melalui konsesi atau bentuk kerja sama lainnya serta kewajiban pelayanan publik untuk angkutan massal yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah.

DPR dan pemerintah menargetkan pembahasan RUU LLAJ dapat diselesaikan pada 2026 sehingga aturan baru dapat diterapkan mulai 2027. "Kita usahakan secepat mungkin. Harapan kami 2026 ini bisa selesai, sehingga bisa dilaksanakan pada tahun 2027," kata Dudy.

Syaiful berharap perubahan regulasi tidak berhenti pada penyesuaian hukum dengan perkembangan teknologi, tetapi juga berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan. "Kami harapkan hasil penyusunan RUU bermuara pada peningkatan keselamatan dan keamanan berlalu lintas, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat." (tin,ist,kum/dya)

Pemerintah pada rapat kerja bersama Komisi V DPR menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah menyusun DIM melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Dalam usulan DPR terdapat 89 pasal yang diubah, 56 pasal baru disisipkan, lima pasal dihapus, dua judul bab diubah, satu bab baru disisipkan, dan dua penjelasan pasal diubah. Sementara pemerintah mengusulkan perubahan terhadap 55 pasal dan penambahan 28 pasal baru.

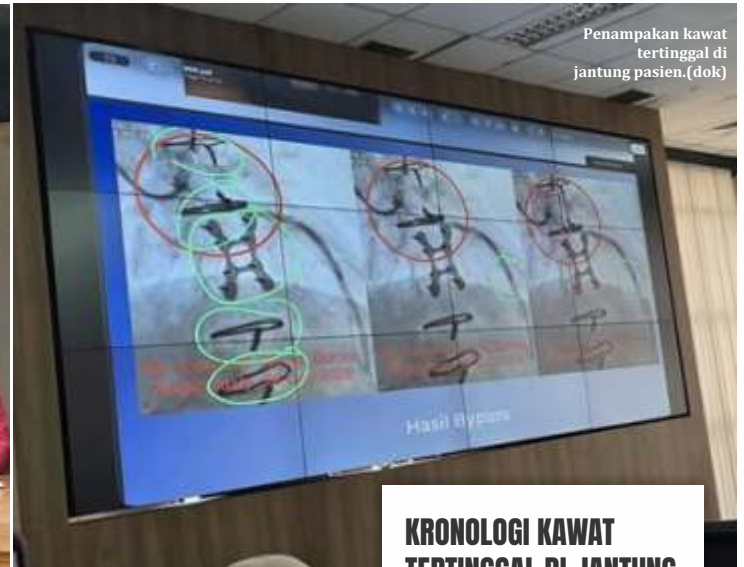
"Menindaklanjuti RUU inisiatif

KAWAT TERTINGGAL DI JANTUNG PASIEN DI SAMARINDA, KEMENKES INVESTIGASI

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerjunkan tim investigasi dari Inspektorat Jenderal untuk mengusut dugaan kawat pemandu medis (guidewire) yang tertinggal di jantung pasien setelah menjalani pemasangan ring di RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Samarinda, Kalimantan Timur. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan hal ini diperlukan untuk memastikan duduk perkara kasus tersebut secara proporsional.



Kuasa hukum keluarga Ediyanto, Jafri Musa bersama keluarga pasien.



Penampakan kawat tertinggal di jantung pasien. (dok)

Tim diterjunkan setelah kasus yang dialami Ediyanto Wongso (63), pasien rutin cuci darah, mencuat ke publik.

"Kita sudah mengirim tim investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk melihat dan mengidentifikasi kasus tersebut secara proporsional," kata Dante dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Dante mengatakan Kemenkes akan memberikan tindakan apabila hasil investigasi menemukan adanya kelalaian. Penanganan disiplin profesi, kata dia, dilakukan melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP).

"Kalau memang ini kelalaian, tentu akan kami tindak," ujar Dante.

Menurut Dante, proses penanganan tidak langsung berujung pada sanksi. Ada tahapan mulai dari identifikasi dan pemeriksaan hingga keputusan tindakan berdasarkan hasil investigasi. "Jadi memang adauntutannya dari mulai identifikasi sampai tindakan itu akan dilakukan secara proporsional," katanya.

Kasus ini bermula dari tindakan medis terhadap Ediyanto di RSUD AWS pada Februari 2026. Berdasarkan keterangan keluarga yang dihimpun dari pemberitaan sejumlah media, Ediyanto merupakan pasien hemodialisis rutin. Ia mengalami keluhan berupa nyeri di dada dan ulu hati sebelum menjalani tindakan di Cath Lab RSUD AWS pada 19 Februari 2026. Keluarga menyebut dokter berinisial MF kemudian melakukan pemasangan stent auring jantung.

Namun, kondisi Ediyanto disebut tidak membaik setelah tindakan. Keluarga kemudian membawanya ke Mount Elizabeth Novena Hospital, Singapura. Pada 22 Februari 2026, Ediyanto menjalani kateterisasi ulang. Dalam pemeriksaan tersebut, keluarga mendapat informasi mengenai adanya benda asing berupa guidewire yang disebut putus dan tertinggal di jantung atau pembuluh darah pasien.

Keluarga menyatakan dokter di Singapura menyebut kawat tersebut tidak dapat dikeluarkan kembali dan akhirnya permanen berada di dalam tubuh Ediyanto. Kondisi tersebut menjadi dasar keluarga meminta pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit. Klaim mengenai penyebab dan kelalaian tersebut masih merupakan bagian dari perkara yang kini ditelusuri, sehingga belum dapat dinyatakan sebagai malapraktik sebelum proses pemeriksaan selesai.

Persoalan itu kemudian berkembang menjadi sengketa kompensasi. Menurut keterangan keluarga dan kuasa hukumnya, pertemuan dan mediasi dengan pihak dokter serta RSUD AWS berlangsung sebanyak 14 kali sejak April hingga Agustus 2026. Keluarga menyebut dalam proses tersebut terdapat kesepakatan kompensasi Rp5 miliar dengan dokter MF. Kesepakatan itu disebut memiliki tenggat pembayaran pada Juli 2026, tetapi tidak terealisasi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kalimantan Timur pada Selasa (29/9), persoalan kompensasi kembali mencuat. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi mengatakan keluarga sebelumnya

mendapat informasi bahwa guidewire yang tertinggal tidak dapat dikeluarkan, termasuk melalui tindakan bypass. "Di Singapura itu dokter memastikan bahwa sang pasien ketika menjalani pemasangan ring sebelumnya terdapat kawat yang putus yang menempel di pembuluh darahnya," kata Darlis.

Nilai kompensasi yang diminta keluarga kini disebut meningkat menjadi Rp6,5 miliar. Menurut keterangan yang disampaikan dalam RDP, tambahan tersebut dikaitkan dengan biaya pengobatan yang terus berjalan setelah kesepakatan awal Rp5 miliar tidak terealisasi. Dewan Pengawas RSUD AWS, di sisi lain, menyampaikan versi berbeda mengenai perkembangan nilai kompensasi tersebut.

Ketua Dewas RSUD AWS Syahrir A. Pasinringi mengatakan dokter MF sebelumnya bersedia membayar Rp5 miliar secara kekeluargaan, tetapi kemudian muncul permintaan Rp6,5 miliar.

Selain persoalan kompensasi, DPRD Kaltim juga menyoroti penerapan standar operasional prosedur dan komunikasi medis dalam kasus tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan sebelumnya menyatakan masih melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan terhadap persoalan yang dialami Ediyanto.

Dari sisi regulasi, pemeriksaan disiplin profesi tenaga medis kini memiliki mekanisme melalui Majelis Disiplin Profesi. Kemenkes menetapkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yang saat ini

KRONOLOGI KAWAT TERTINGGAL DI JANTUNG

18 FEBRUARI 2026

Ediyanto Wong (63) mengalami nyeri dada saat hemodialisis di RSUD AWS Samarinda.

19 FEBRUARI 2026

Menjalani tindakan Cath Lab dan pemasangan stent/ring. Keluarga mempertanyakan penjelasan soal risiko tindakan.

20-22 FEBRUARI

Dirujuk ke Singapura. Kateterisasi menemukan 2 potongan guidewire ±2 cm tertanam di jantung dan tidak dapat diambil.

APRIL-AGUSTUS

Mediasi berlangsung 14 kali. Kesepakatan kompensasi Rp5 miliar disebut tidak terealisasi.

SEPTEMBER

Keluarga meminta pertanggungjawaban dokter dan RSUD AWS. Kasus mendapat perhatian DPRD Kaltim.

30 SEPTEMBER

Dinkes Kaltim menyatakan masih melakukan monitoring dan evaluasi. DPRD Kaltim meminta penyelesaian kasus.

30 SEPTEMBER

Kemenkes mengirim tim investigasi. Jika terbukti lalai, kasus dapat diproses melalui MDP.

berstatus berlaku. Kemenkes juga telah menetapkan jenis pelanggaran disiplin profesi melalui Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/ 775/2025. (tin, ant, rls/dya)

PESTA NARKOBA, 3 ANGGOTA DPRD DI JATIM DITANGKAP

Penggerebekan sebuah kamar hotel di kawasan Ketintang, Surabaya, Senin (28/9/2026) dini hari, menyeret tiga anggota DPRD dari tiga kabupaten di Jawa Timur. Ketiganya diamankan bersama lima orang lain dalam penindakan yang dilakukan Unit 1 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya

RINGKASAN KASUS NARKOBA DI INDONESIA DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

Lonjakan Kasus Pasca-Pandemi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Polri menunjukkan jumlah terlapor kasus narkoba sempat turun di awal pandemi menjadi 31.358 orang (2020), namun melonjak drastis hampir 55% pada tahun 2021 menjadi 48.358 orang.

Tren Fluktuatif 2022-2023

Data Pusiknas Bareskrim Polri mengungkapkan keterlibatan narkoba sempat sedikit melandai pada 2022 (44.983 orang), sebelum kembali naik tajam pada 2023 hingga menyentuh angka 50.291 orang.

Rekor Pengungkapan Masif (2025):

Dalam Laporan Kinerja Akhir Tahun Markas Besar Polri, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Polri dan BNN mencatat salah satu rekor terbesar dengan mengungkap 38.934 kasus, menangkap 51.753 tersangka, dan menyita total 197,71 ton barang bukti.

Dominasi Kriminalitas Nasional (2026):

Memasuki tahun 2026, narkoba tetap konsisten menjadi salah satu jenis kejahatan tertinggi. Sebagai contoh, Laporan Bulanan Pusiknas Polri di Agustus 2026, tercatat ada 4.745 kasus narkoba yang dilaporkan, menyumbang 12,11% dari total seluruh laporan kriminalitas di Indonesia.

Daerah Rawan Utama

Secara akumulatif, 3 teratas yaitu wilayah hukum Polda Jawa Timur, Polda Metro Jaya, dan Polda Sumatera Utara

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan penindakan itu bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba. Informasi tersebut menyebut seorang karyawan swasta berinisial N berada di sebuah kamar hotel dan diduga menggunakan narkoba. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi dan melakukan penggerebekan.

"Dalam pemeriksaan, belakangan diketahui bahwa tiga orang di antaranya berstatus sebagai wakil rakyat dari kabupaten di wilayah Jawa Timur," kata Hadi, Rabu (30/9/2026).

Delapan orang yang diamankan masing-masing berinisial F, R, K, N, Ro, U, Ar, dan A. Dari pemeriksaan polisi, tiga di antaranya diketahui merupakan anggota DPRD dari Kabupaten Malang, Banyuwangi, dan Situbondo. Ketiganya disebut berasal



dari Fraksi Gerindra.

Keterangan sejumlah media lokal menyebut U merupakan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang. Ar disebut merupakan anggota DPRD Banyuwangi, sedangkan A merupakan anggota Fraksi Gerindra DPRD Situbondo.

Informasi mengenai keterlibatan legislator Kabupaten Malang kemudian dikonfirmasi ke internal Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang Ziaul Haq mengatakan pihaknya belum memperoleh informasi resmi dari aparat mengenai perkara yang dikaitkan dengan U.

Zia mengaku telah mencoba menghubungi U melalui WhatsApp dan telepon. Namun, upaya tersebut belum mendapat respons.

"Saya WA dan telepon yang bersangkutan belum bisa, tapi memang dari dulu sulit dihubungi," kata Zia, seperti dikutip Disway Malang.

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, kata Zia, tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum memperoleh informasi dari aparat penegak hukum. Ia meminta semua pihak menunggu keterangan resmi kepolisian karena perkara tersebut menyangkut tuduhan yang sensitif.

"Kita tunggu saja informasi validnya (dari polisi) karena ini tuduhan yang sensitif," ujarnya.

Barang Bukti Sabu dan Ekstasi

Dari kamar hotel tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya satu plastik atau klip bekas sabu, dua butir pil ekstasi berwarna kuning, alat isap, korek api, serta satu bungkus rokok bekas yang disebut

digunakan untuk menyimpan narkoba.

Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan tes urine terhadap delapan orang yang diamankan. Hasilnya, tujuh orang dinyatakan positif mengonsumsi ekstasi. Sementara N diketahui positif menggunakan dua jenis narkoba, yakni sabu dan ekstasi.

"Sementara dari hasil tes urine, tujuh orang positif ekstasi, sedangkan N positif ekstasi dan sabu," kata Hadi.

Polisi juga menyebut kedelapan orang tersebut berada dalam kondisi telah mengonsumsi narkoba ketika petugas melakukan penggerebekan. Dalam pemeriksaan awal, mereka disebut mengaku baru pertama kali menggunakan narkoba.

"Baru sekali," ujar Hadi ketika ditanya mengenai pengakuan kedelapan orang tersebut.

Hadi mengatakan proses pemeriksaan terhadap delapan orang tersebut masih berlangsung. Mereka tidak langsung ditetapkan sebagai pelaku peredaran narkoba karena penyidik masih menunggu hasil asesmen.

"Masih dalam pemeriksaan. Dilakukan sesuai prosedur, melalui TAT (Tim Asesmen Terpadu). Tentunya nanti tunggu hasil dari tim asesmen terpadu di BNN Kota Surabaya," kata Hadi.

N Membeli dari Buronan

Dalam pemeriksaan, N disebut mengaku mendapatkan sabu dan ekstasi dari seseorang berinisial C. Polisi menyebut transaksi tersebut berlangsung di salah satu lokasi di wilayah Surabaya.

C kini masuk dalam daftar

pencarian orang atau DPO. Dengan demikian, selain menangani delapan orang yang diamankan dari hotel, polisi masih memiliki pekerjaan lanjutan untuk mencari dan menangkap pihak yang disebut sebagai pemasok narkoba tersebut.

"Dari keterangan saudara N, yang bersangkutan membeli narkoba dan ekstasi dari seseorang berinisial C (DPO) di salah satu alamat di wilayah Surabaya," kata Hadi.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian yang masih dialami penyidik. Polisi belum menyampaikan lebih jauh mengenai jaringan C maupun jumlah narkoba yang disebut dibeli N.

Meski hasil tes urine menunjukkan penggunaan narkoba, delapan orang tersebut tidak langsung ditahan untuk diproses sebagai tersangka dalam perkara peredaran narkoba.

Hadi mengatakan barang bukti yang ditemukan polisi berada di bawah batas yang menjadi acuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Atas dasar itu, penanganan perkara diarahkan melalui mekanisme restorative justice.

"Karena barang bukti yang ditemukan ada di bawah batas aturan, kami proses kasus ini secara restorative justice untuk delapan pelaku. Kami pastikan semua kami proses sesuai prosedur," kata Hadi.

Namun, istilah restorative justice dalam perkara tersebut tidak berarti proses pemeriksaan dihentikan begitu saja. Polisi masih melakukan asesmen terhadap delapan orang tersebut melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) di BNN Kota Surabaya.

Tim tersebut akan melakukan penilaian terhadap kondisi para pengguna dan menentukan rekomendasi penanganan, termasuk apakah mereka memenuhi kriteria untuk menjalani rehabilitasi.

"Masih dalam proses pemeriksaan di BNNK Surabaya," ujar Hadi.

Polisi menegaskan perkara tetap ditangani sesuai prosedur meskipun mekanisme yang ditempuh berbeda dari perkara peredaran narkoba dengan barang bukti dalam jumlah lebih besar. Kabar mengenai tiga anggota DPRD yang diamankan juga mendapat respons dari DPD Gerindra Jawa Timur. Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Kharisma Febriansyah mengatakan partai belum mengambil tindakan terhadap tiga kader tersebut karena masih menunggu hasil resmi pemeriksaan aparat.

Kharisma menekankan asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan dan proses hukum yang jelas. "Namun kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami tunggu pengumuman atau investigasi dari aparat kepolisian," kata Kharisma, Rabu (30/9/2026). (tin,ssn,kum/dya)

Stunting di Kota Batu Naik 2,56%, Kenapa?



Ilustrasi: Pengukuran tinggi badan anak pada pelaksanaan posyandu bulan timbang di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. (foto: Dinkes Kota Batu)

BATU- Angka stunting di Kota Batu tercatat meningkat menjadi 12,75 persen pada 2026. Angka tersebut naik 2,56 persen dibandingkan sebelumnya yang berada di level 10,19 persen.

Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menyebut kenaikan angka stunting tersebut berkaitan dengan perluasan dan peningkatan akurasi pendataan. Pemerintah daerah menegaskan keterbukaan data dilakukan sebagai bagian dari transparansi kondisi

status gizi balita di Kota Batu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, Rabu (30/9/2026) mengatakan, Pemkot Batu tidak ingin melakukan manipulasi data demi menjaga citra daerah. Menurutnya, data yang lebih akurat justru diperlukan sebagai dasar untuk menentukan intervensi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. "Kita sendiri yang justru berani membuka kondisi riil status stunting yang terdata," katanya.

Untuk memperkuat pendataan, tim medis bersama relawan diterjunkan langsung ke lapangan untuk menyisir status gizi balita hingga tingkat tapak. Pendataan dilakukan menggunakan instrumen Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan aplikasi kesehatan daerah.

Dengan cakupan pendataan yang lebih luas dan presisi, menurutnya, pemerintah dapat memperoleh

gambaran sebaran balita yang terindikasi stunting secara lebih jelas. Data tersebut kemudian menjadi dasar dalam merumuskan langkah penanganan yang lebih tepat sasaran.

Untuk mengatasinya, Pemkot Batu membentuk Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (P3S) Kota Batu. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek pemenuhan gizi, tetapi melibatkan sejumlah sektor yang dinilai berkaitan dengan kesehatan dan tumbuh kembang balita.

"Persoalan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kesehatan. Intervensi membutuhkan keterlibatan lintas sektor, mulai dari perangkat daerah hingga kecamatan, kelurahan, dan desa," ujarnya.

Menurutnya, pemenuhan nutrisi bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang balita. Kondisi lingkungan, khususnya ketersediaan sanitasi layak dan air bersih, juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting.

"Apakah kecukupan gizi hanya tergantung pada makanan saja? Jelas tidak. Ketersediaan sanitasi layak dan lingkungan bersih sangat memengaruhi derajat kesehatan balita di masyarakat hingga 70 persen," kata Alfi.

Atas dasar itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu ini menginstruksikan perangkat daerah terkait, khususnya bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya, untuk mempercepat penyediaan sarana sanitasi dasar serta utilitas air bersih di kawasan permukiman warga.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan konvergensi intervensi, yakni penanganan stunting melalui keterlibatan berbagai sektor secara terpadu. Upaya ini dinilai penting, terutama ketika kondisi ekonomi keluarga dapat membatasi kemampuan memenuhi kebutuhan nutrisi yang seimbang.

Pemkot Batu juga mendorong penguatan peran masyarakat di tingkat lingkungan. Kepala desa, lurah, hingga kader posyandu diharapkan tidak hanya menjalankan pen-dampingan, tetapi turut membangun kepedulian sosial terhadap keluarga yang membutuhkan.

"Ketika ada anak-anak yang kesulitan makan atau berasal dari keluarga kurang mampu, muncul rasa tanggung jawab sosial, kebersamaan, dan kesadaran patungan. Itulah wujud nyata konvergensi lintas sektoral yang kita dorong untuk bersama-sama mengentaskan stunting," jelasnya. (Santi/Dya)

Pemkot Malang Akui Damkar Sulit Tambah Armada karena Berstatus UPT

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengakui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) masih kesulitan menambah armada karena keterbatasan anggaran. Kondisi ini salah satunya berkaitan dengan posisi Damkar yang hingga kini masih bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sehingga anggaran yang tersedia harus dibagi.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, jumlah armada Damkar yang dimiliki saat ini memang belum mencapai jumlah ideal. Namun, kondisi anggaran membuat pemerintah masih mengandalkan armada yang tersedia. "Kalau jumlah idealnya memang kurang. Tetapi karena ada keterbatasan anggaran, maka kami masih menggunakan yang ada saat ini," ujar Wahyu, dikutip pada Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, salah satu upaya yang tengah didorong Pemkot Malang untuk memperkuat pengelolaan Damkar adalah menjadikan UPT Damkar sebagai dinas tersendiri. Usulan tersebut telah diajukan kepada DPRD

Kota Malang.

Wahyu menjelaskan, apabila Damkar berdiri sebagai perangkat daerah sendiri, pengelolaan anggaran dapat lebih difokuskan pada kebutuhan pemadam kebakaran. Termasuk untuk mendukung pengadaan armada baru.

"Kalau berdiri sendiri, mereka lebih bisa mengalokasikan anggarannya dan lebih leluasa, dan tentunya terkait dengan pengadaan ini bisa lebih memungkinkan. Kalau sekarang kan masih gabung dengan Satpol PP, sehingga anggarannya dibagi," jelasnya.

Tak hanya armada, Pemkot Malang juga menyoroti keberadaan hidran yang dapat mendukung penanganan kebakaran. Wahyu mengatakan saat ini terdapat sekitar 50 hidran di Kota Malang. Namun, sebagian hidran tersebut disebut tidak berfungsi sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali.

Pemkot Malang juga akan mengevaluasi kebutuhan penambahan hidran di sejumlah titik. Penambahan nantinya akan diarahkan

ke lokasi-lokasi strategis yang dinilai masih membutuhkan fasilitas tersebut. "Kami akan coba cek ulang," imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala UPT Damkar Kota Malang, Pandu Rizki Darmawan mengatakan armada yang tersedia saat ini masih dapat digunakan untuk menangani kejadian kebakaran. Menurut Pandu, UPT Damkar Kota Malang saat ini memiliki 6 kendaraan operasional. Rinciannya terdiri dari 3 fire truck dan 3 kendaraan supply.

Tiga fire truck menjadi kendaraan utama dalam penanganan kebakaran. Sementara tiga kendaraan supply digunakan untuk mengirimkan pasokan air dan tidak secara langsung berhadapan dengan titik api.

Meski masih mampu menjalankan tugas dengan armada yang ada, Pandu mengatakan pihaknya tetap



Ilustrasi: Mobil pemadam kebakaran UPT Damkar Kota Malang. (Santi/Lentera)

membutuhkan tambahan kendaraan. Usulan tersebut disebut selalu disampaikan dalam pembahasan bersama DPRD Kota Malang. "Harapan kami memang kami ingin setidaknya ada tambahan armada. Khususnya untuk menjawab perkembangan zaman," katanya. (Santi/Dya)

NETANYAHU BERI SINYAL ADA ANCAMAN SERANGAN JELANG PEMILU

Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat menjelang pemilu legislatif Israel yang dijadwalkan berlangsung 27 Oktober 2026. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah menerima indikasi bahwa musuh-musuh Israel berencana melancarkan serangan sebelum pemungutan suara.

Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam video yang direkam di pangkalan Angkatan Udara Israel dan dirilis kantor perdana menteri pada Selasa (29/9) waktu setempat. Ia tidak menjelaskan secara terbuka siapa yang dimaksud sebagai musuh maupun bentuk ancaman yang dimaksud.

"Kita memiliki indikasi bahwa menjelang pemilu, musuh-musuh kita akan berusaha menyerang kita," kata Netanyahu seperti dilansir AFP, Rabu (30/9/2026).

Netanyahu kemudian menyampaikan peringatan kepada pihak yang disebutkan sebagai musuh Israel. "Jadi... saya sampaikan pesan ini kepada Anda: Jangan macam-macam dengan kami, baik sekarang maupun kapan pun. Jangkauan kami yang panjang bisa mencapai Anda di mana saja dan kapan saja," ujarnya.

Pernyataan tersebut segera memicu respons dari kubu oposisi. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid meminta penjelasan keamanan mendesak kepada Netanyahu untuk memastikan ancaman tersebut benar-benar ada dan mengetahui langkah pemerintah agar pemilu tetap berlangsung tanpa gangguan.

"Saya ingin mengetahui apakah ancaman tersebut nyata, dan jika iya, bagaimana Perdana Menteri bersiap kali ini untuk memastikan pemilu berlangsung tanpa gangguan," kata Lapid melalui media sosial X.

Kantor Netanyahu kemudian menyatakan bahwa sang perdana menteri telah menginstruksikan sekretaris militernya untuk memberikan informasi terbaru kepada Lapid mengenai perkembangan keamanan.

Dalam perkembangan berikutnya, Lapid memang menerima pengarahannya dari Netanyahu.

Kantor perdana menteri menyebut pertemuan itu memaparkan peringatan mengenai kemungkinan serangan di sejumlah front menjelang pemilu. Namun, sejumlah laporan media Israel menyebut militer tidak mengetahui adanya ancaman spesifik yang menunjukkan serangan akan dilakukan menjelang pemilu dan tidak menaikkan tingkat kewaspadaan secara khusus.

Setelah menerima pengarahannya, Lapid mengatakan masyarakat tidak memiliki alasan untuk panik. Ia juga menilai ancaman keamanan harus ditangani secara profesional dan

bertanggung jawab, bukan dijadikan bagian dari komunikasi politik menjelang pemilu.

Persoalan keamanan itu muncul ketika Israel masih menghadapi ketegangan di sejumlah front kawasan. Netanyahu dalam beberapa pekan terakhir meningkatkan peringatannya terhadap Iran, Hamas dan Hezbollah. Pemerintah Israel juga masih melakukan operasi militer di Gaza dan Lebanon.

PM Qatar:

Netanyahu Penjahat Perang

Di tengah situasi tersebut, Qatar ikut berada dalam sorotan. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani secara terbuka menyebut Netanyahu sebagai "penjahat perang".

Pernyataan itu disampaikan Al Thani dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan pada Selasa (29/9) waktu setempat. Ketika ditanya apakah ia menganggap Netanyahu sebagai penjahat perang, Al Thani menjawab, "Tentu saja."

"Apa yang telah dilakukan di Gaza adalah kejahatan perang, dan siapa pun yang bertanggung jawab atas hal ini adalah penjahat perang," katanya.

Al Thani menyinggung serangan terhadap fasilitas sipil di Gaza. Menurut dia, rumah sakit dan sekolah telah menjadi sasaran. Ia menilai alasan apa pun yang digunakan tidak dapat membenarkan tindakan tersebut.

Pernyataan Al Thani merupakan tuduhan politik dari pemerintah Qatar terhadap Netanyahu. Israel sendiri membantah berbagai tuduhan terkait tindakannya di Gaza dan selama ini menyatakan operasi

militernya ditujukan untuk menghadapi Hamas.

Di luar pertukaran tuduhan tersebut, Doha menyatakan tetap akan menjalankan peran diplomatiknya. Qatar masih terlibat dalam upaya mediasi untuk meredakan ketegangan regional, termasuk komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran. Pada 30 September, Reuters melaporkan bahwa Qatar menyampaikan respons Amerika Serikat kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi terkait proposal tujuh hari untuk membangun kepercayaan dan membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Qatar juga memiliki posisi khusus dalam konflik Gaza karena selama bertahun-tahun menjadi salah satu mediator antara Israel dan Hamas. Hubungan itu semakin sensitif setelah Israel melancarkan serangan ke Doha pada September 2025 yang menargetkan pejabat Hamas. Serangan tersebut menewaskan lima anggota Hamas dan seorang anggota pasukan keamanan Qatar, tetapi tidak menewaskan pejabat senior Hamas yang menjadi sasaran.

Al Thani kembali menyinggung serangan tersebut dalam

JADWAL & AGENDA PEMILU 2026

- **27 Oktober 2026:** Pemilu legislatif Israel.
- **Ujian Netanyahu:** Pertarungan penting atas kepemimpinannya sejak perang Gaza.
- **Isu keamanan:** Netanyahu memperingatkan potensi serangan menjelang pemilu.
- **Survei:** Likud dilaporkan merosot di bawah oposisi Yashar.

SISTEM PARLEMEN

- **120 kursi:** Diperebutkan di Knesset.
- **Pilih partai:** Bukan kandidat individu.
- **Proporsional:** Kursi berdasarkan suara nasional.
- **Ambang parlemen:** Hanya partai yang lolos threshold mendapat kursi.

TAK ADA MAYORITAS TUNGGAL

- **61 kursi:** Batas mayoritas Knesset.
- **Tak ada partai tunggal:** Pemerintahan membutuhkan koalisi.
- **Partai kecil berpengaruh:** Partai agama, kanan, dan Arab bisa menjadi penentu.
- **Negosiasi koalisi:** Menentukan pembentukan pemerintahan.

PEMILU BERULANG

- **Koalisi rentan pecah:** Perbedaan ideologi dan kebijakan memicu konflik.
- **Pemilu dini:** Knesset dapat dibubarkan sebelum masa jabatan berakhir.
- **Netanyahu jadi pusat konflik:** Kepemimpinan dan isu seperti wajib militer Yahudi ultra-Ortodoks memicu ketegangan.

wawancaranya dengan Morgan. Ia menilai serangan terhadap Qatar terjadi ketika negaranya sedang menjalankan fungsi mediasi.

"Israel menyerang kami ketika kami sedang menjadi mediator," kata Al Thani, seraya menyebut tindakan itu sebagai serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara yang menjalankan fungsi mediasi.

Meski hubungan dengan Israel memburuk, Qatar mengatakan akan tetap memilih jalur diplomasi. Al Thani menyebut Doha masih berupaya membantu Washington dan Teheran mencari jalan keluar dari konflik yang lebih luas.

Ia menyebut tiga persoalan utama yang perlu ditangani, yakni program nuklir dan sanksi terhadap Iran, kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, serta pengaturan keamanan regional yang melibatkan Iran dan negara-negara Teluk. (ttn,rtr,ist/dya)



WASPADA! LAPTOP DI PANGKUAN ANAK BERJAM-JAM PICU SINDROM KULIT TERBAKAR

Kebiasaan anak menggunakan laptop berjam-jam sambil meletakkannya langsung di pangkuan atau perut ternyata bisa menimbulkan masalah pada kulit. Panas yang terus-menerus mengenai area tubuh yang sama dapat memicu erythema ab igne (EAI), kondisi kulit yang juga dikenal sebagai toasted skin syndrome atau sindrom kulit terbakar.

Kasus tersebut terungkap setelah seorang anak laki-laki di Inggris mengalami perubahan warna kulit pada bagian perut dan paha.

Laporan dua dokter dari University Hospitals of Leicester NHS Trust itu dipublikasikan dalam jurnal BMJ Case Reports pada September 2026.

Awalnya, anak tersebut datang dengan bercak kemerahan dan kecokelatan di bagian perut. Polanya menyerupai jaring dengan ukuran sekitar 15 sentimeter. Bercak tersebut pada awalnya tidak terasa sakit ataupun hangat ketika disentuh.

Dokter sempat menduga perubahan pada kulit itu berkaitan dengan memar atau cedera. Pemeriksaan lebih lanjut, termasuk CT scan, tidak menemukan cedera internal yang dapat menjelaskan munculnya bercak tersebut.

Dua minggu kemudian, anak itu kembali ke rumah sakit. Bercaknya semakin luas dan gelap, mulai terasa nyeri, bahkan menunjukkan tanda kerusakan kulit.

Dari penelusuran lebih jauh terhadap kebiasaan sehari-hari, dokter mengetahui anak tersebut menjalani homeschooling dan menggunakan laptop untuk belajar. Ia terbiasa meletakkan laptop langsung di atas perut atau memangkunya hingga delapan jam sehari.

"Ia melaporkan meletakkan laptop di atas perutnya hingga delapan jam setiap hari, sering kali saat sedang mengisi daya," kata dokter yang menangani anak tersebut, seperti dikutip dari Ars Technica.

Keterangan itu menjadi petunjuk penting bagi dokter. Anak tersebut kemudian didiagnosis mengalami erythema ab igne, yakni perubahan kulit akibat paparan panas

rendah secara berulang dan dalam waktu lama.

Bukan luka bakar biasa

EAI berbeda dengan luka bakar yang terjadi akibat kontak singkat dengan benda bersuhu sangat tinggi. Pada EAI, panas yang mengenai kulit relatif rendah, tetapi berlangsung terus-menerus dan berulang.

Menurut Cleveland Clinic, kondisi tersebut terjadi ketika kulit terpapar panas tingkat rendah dalam waktu lama. Sumbernya antara lain laptop, bantal pemanas, pemanas ruangan hingga jok mobil berpemanas. Pada tahap awal, kondisi ini umumnya tidak berbahaya, tetapi perubahan warna kulit dapat menetap jika paparan panas terus berlangsung.

Literatur medis menyebut paparan panas yang memicu EAI biasanya berada di bawah ambang yang menyebabkan luka bakar langsung. StatPearls mencatat paparan kronis yang berkaitan dengan EAI umumnya berada di bawah sekitar 45 derajat Celsius.

Karena itu, anak belum tentu merasa sedang mengalami "kepanasan". Laptop yang hanya terasa hangat ketika digunakan mungkin tidak dianggap berbahaya. Masalah muncul ketika panas tersebut mengenai bagian kulit yang sama selama berjam-jam.

Seperti apa tanda-tandanya?

EAI biasanya diawali perubahan warna kulit. Bercak dapat terlihat kemerahan, kemudian berubah menjadi cokelat atau lebih gelap dengan pola khas menyerupai jaring atau renda.

Pada beberapa kasus, kulit juga

dapat terasa gatal atau seperti terbakar. Jika paparan terus berlanjut, perubahan kulit dapat berkembang menjadi lebih menetap dan bahkan disertai kerusakan permukaan kulit.

Kasus pada anak di Inggris tersebut memperlihatkan pentingnya memperhatikan pola bercak. Para peneliti menyebut EAI akibat laptop perlu masuk dalam pertimbangan ketika anak datang dengan ruam atau perubahan warna kulit berbentuk retikuler yang tidak jelas penyebabnya. Pengenalan lebih awal dapat mencegah salah diagnosis dan pemeriksaan yang tidak diperlukan.

Botol hingga Perapian Panas

EAI sebenarnya bukan kondisi baru. Sebelum era perangkat elektronik, kondisi ini lebih banyak dikaitkan dengan paparan panas dari tungku, perapian, botol air panas, bantal pemanas atau lingkungan kerja yang panas.

Perkembangan teknologi kemudian menghadirkan sumber panas baru. Laptop, misalnya, dapat menghasilkan panas dari baterai, sistem pendingin dan komponen lain ketika digunakan dalam waktu lama. Ketika perangkat ditempelkan langsung ke kulit, panas tersebut lebih mudah mengenai area tubuh yang sama.

Kasus laptop sebagai pemicu EAI juga telah dilaporkan dalam berbagai

publikasi medis. Salah satu laporan pada seorang mahasiswa di India menemukan perubahan warna kulit pada perut setelah ia terbiasa menggunakan laptop langsung di atas kulit selama dua hingga tiga jam sehari selama dua tahun.

Dalam laporan lain, seorang pengguna laptop yang menempatkan perangkat langsung di atas perut selama tiga hingga empat jam sehari mengalami perubahan kulit berbentuk jaring. Setelah kebiasaan tersebut dihentikan, perubahan warna kulit berangsur menghilang dalam sekitar enam bulan.

Di Indonesia, peringatan mengenai kebiasaan memangku laptop juga pernah disampaikan dalam pemberitaan kesehatan. Dokter spesialis kulit yang dikutip detikHealth menjelaskan bahwa orang yang menghabiskan waktu lama untuk belajar, bekerja atau bermain game dengan laptop di pangkuan berisiko mengalami kondisi tersebut.

Langkah pencegahan sebenarnya sederhana yaitu jangan biarkan laptop bersentuhan langsung dengan kulit dalam waktu lama.

Saat anak belajar menggunakan laptop, letakkan perangkat di meja atau gunakan laptop stand. Jika terpaksa menggunakan laptop dalam posisi duduk santai, gunakan alas yang dapat menciptakan jarak antara permukaan laptop dan kulit.

Orang tua juga perlu memperhatikan durasi penggunaan. Anak yang belajar dari rumah, melakukan homeschooling, bermain gim atau mengikuti kegiatan digital dalam waktu panjang lebih berisiko melakukan kebiasaan tersebut tanpa menyadarinya. (far,ist/dya)



SATU PERTANYAAN AI HABISKAN BERAPA BANYAK AIR?

Sebberapa banyak air yang dibutuhkan ketika seseorang mengajukan satu pertanyaan kepada kecerdasan buatan (AI)? Jawabannya ternyata tidak sederhana satu angka. Belakangan beredar berbagai perkiraan mengenai penggunaan air oleh layanan AI.

Google, misalnya, menyebut satu perintah teks pada Gemini menggunakan sekitar 0,26 mililiter air atau setara lima tetes. Di sisi lain, sebuah penelitian yang banyak dikutip memperkirakan penulisan surel sepanjang 100 kata menggunakan GPT-4 dapat berkaitan dengan penggunaan air sekitar 519 mililiter atau hampir satu botol.

Perbedaan yang cukup jauh itu

bukan otomatis berarti salah satu angka keliru. Keduanya menggunakan batas penghitungan yang berbeda.

Google mengukur penggunaan air Gemini dengan metode yang mencakup berbagai komponen operasional dalam penyediaan layanan. Dalam pengukuran median untuk perintah teks Gemini pada Mei 2025, Google memperkirakan konsumsi air sebesar 0,26 mililiter. Angka tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan energi dan penggunaan air pusat data Google.

Sementara itu, sejumlah penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan memasukkan penggunaan air tidak langsung yang berkaitan dengan produksi listrik.

Air langsung dan Tak langsung

Perbedaan tersebut dapat dipahami melalui dua jenis penggunaan air.

Pertama, penggunaan air langsung di pusat data. Air digunakan antara lain dalam sistem pendinginan untuk membantu menjaga suhu peralatan komputasi yang bekerja terus-menerus.

Kedua, penggunaan air tidak langsung. Air digunakan pada tahap pembangkitan listrik yang memasok energi ke pusat data. Sebagian pembangkit listrik membutuhkan air untuk sistem pendinginan.

Karena itu, perhitungan yang hanya melihat air yang digunakan di pusat data akan menghasilkan angka

lebih kecil. Sebaliknya, perhitungan yang memasukkan rantai pasokan listrik dapat menghasilkan angka lebih besar.

Masalahnya, satu angka perintah AI tidak dapat dianggap berlaku untuk semua layanan dan semua kondisi. Konsumsi air dipengaruhi model AI, perangkat keras, lokasi pusat data, sumber listrik, sistem pendinginan, panjang perintah dan jawaban, serta tingkat efisiensi infrastruktur.

Google sendiri mencatat bahwa angka 0,26 mililiter merupakan hasil pengukuran pada kondisi dan periode tertentu, bukan angka tetap untuk setiap perintah Gemini pada masa mendatang.

Gambaran yang lebih besar terlihat dari penggunaan sumber daya pusat data di Amerika Serikat.

Laporan Lawrence Berkeley National Laboratory untuk Departemen Energi AS menunjukkan pusat data di Amerika Serikat menggunakan air dalam jumlah besar, baik secara langsung maupun melalui penggunaan listrik. Lembaga tersebut memang melakukan pemodelan nasional untuk memperkirakan kebutuhan listrik dan air pusat data.

Pertumbuhan kebutuhan komputasi juga membuat persoalan tersebut semakin penting. Berkeley Lab mencatat konsumsi listrik pusat data Amerika Serikat hampir tiga kali lipat antara 2016 dan 2023. Dalam skenario tertentu, pusat data diperkirakan dapat menyumbang hingga 12 persen konsumsi listrik AS pada 2028.

AI menjadi salah satu pendorong pertumbuhan kebutuhan komputasi tersebut karena model AI membutuhkan pusat data dengan chip berkemampuan tinggi.

Namun, besarnya jejak lingkungan AI tidak berarti setiap pertanyaan yang diajukan pengguna otomatis menghabiskan sejumlah air tertentu. Angka perintah harus dibaca sebagai perkiraan berdasarkan metode dan kondisi tertentu. (far,ist/dya)

(Foto AI : Ilustrasi)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SHAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap tugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

FASHION ITEM TIMELESS YANG BIKIN HEMAT

Pergi ke kampus tidak selalu berarti harus tampil kasual dengan sneakers. Sepatu kini menjadi salah satu elemen penting untuk membentuk karakter penampilan, termasuk ketika ingin menghadirkan gaya feminin, rapi, klasik, hingga sedikit edgy.

Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, memilih fashion item yang benar-benar bisa digunakan berulang kali menjadi salah satu cara untuk mengendalikan pengeluaran. Prinsipnya bukan membeli pakaian semahal mungkin, melainkan mencari barang yang berkualitas, versatile, mudah dipadupadankan, dan sesuai dengan aktivitas sehari-hari.

Konsep tersebut sejalan dengan gagasan cost per wear. Semakin sering sebuah fashion item dikenakan, semakin kecil biaya yang harus ditanggung untuk setiap pemakaiannya. Karena itu, sebuah pakaian yang harganya lebih tinggi tetapi dipakai selama bertahun-tahun dapat memiliki nilai penggunaan yang lebih baik dibandingkan barang murah yang hanya dikenakan sekali atau dua kali.

Vogue dalam panduan wardrobe essentials 2026 juga menempatkan sejumlah item klasik seperti kemeja button-down, jeans, blazer, trench coat, sepatu klasik, dan busana berwarna

netral sebagai fondasi lemari yang dapat digunakan lintas musim. Vogue menekankan bahwa lemari tidak perlu terus-menerus diganti setiap kali tren baru muncul.

Warna Netral

Hitam, putih, beige, abu-abu, dan navy merupakan warna yang relatif mudah dipadukan dengan berbagai busana. Karena itu, fashion item dengan palet tersebut dapat digunakan untuk banyak kesempatan.

Dalam bahan Beautynesia, pilihan ini dapat berupa celana bahan, blazer, hingga hijab. Ketiganya bisa digunakan untuk bekerja, kuliah, menghadiri kondangan semi-formal, maupun hangout bersama teman.

Kuncinya ada pada kombinasi. Dengan mengganti atasan dan sepatu, satu celana atau blazer dapat menghasilkan tampilan berbeda tanpa harus membeli pakaian baru.

Sneakers basic berwarna putih atau cokelat juga dapat menjadi pasangan yang fleksibel karena praktis dan mudah dipadukan dengan berbagai outfit.

Pendekatan ini sejalan dengan tren capsule wardrobe yang masih banyak dibahas media fashion internasional. Vogue pada 2026 menyebut koleksi item dasar yang dapat digunakan berulang kali sebagai fondasi untuk membangun berbagai tampilan.

Namun, lemari timeless tidak harus berarti seluruhnya berwarna netral. Harper's Bazaar mengingatkan bahwa

item yang lebih ekspresif juga bisa menjadi bagian dari lemari serbaguna selama benar-benar digunakan dan dapat dipadukan dengan pakaian lain.

Celana Jeans Berkualitas

Jeans merupakan salah satu item yang relatif mudah digunakan lintas suasana. Namun, kualitas bahan dan potongan tetap perlu diperhatikan

agar celana tidak cepat kehilangan bentuk atau terasa ketinggalan zaman.

Direkomendasikan model high-waisted jeans sebagai salah satu pilihan investasi karena modelnya timeless dan mudah dipadukan. Celana dengan potongan high-rise dan ujung yang rapi dapat dikenakan untuk suasana kasual hingga semi-formal.

Pilihan bahan juga penting. Dalam bahan tersebut, katun organik disebut sebagai salah satu opsi yang lebih ramah lingkungan.

Denim sendiri terus muncul dalam berbagai panduan lemari klasik. Vogue memasukkan jeans sebagai salah satu fondasi wardrobe essentials 2026, sementara Harper's Bazaar juga menyebut denim sebagai bagian dari ekosistem capsule wardrobe.

Model klasik juga bukan berarti membosankan. Pada 2026, Vogue melihat tren fashion bergerak ke arah styling individual, yakni menggunakan siluet familiar dengan cara baru, bukan sekadar mengejar satu tren tertentu.

Tas Kulit Model Sempel

Untuk tas, desain sederhana dapat memberikan ruang penggunaan yang lebih panjang. Bahan Beautynesia menyarankan tas kulit atau faux leather dengan desain simpel dan menghindari logo berukuran besar.

Warna seperti hitam, cokelat, dan taupe relatif mudah dipadukan sehingga tas dapat digunakan untuk berbagai kesempatan.

Jika memilih faux leather, kualitas material juga perlu diperhatikan. Bahan yang menjadi rujukan dalam artikel menyebut silicone leather sebagai salah satu material yang diklaim memiliki ketahanan terhadap hidrolisis serta paparan sinar UV, air,

jamur, dan mikroorganisme.

Meski demikian, konsumen tetap perlu melihat spesifikasi produk dan klaim produsen sebelum membeli. Harga yang lebih mahal tidak otomatis berarti barang lebih awet.

Prinsip yang lebih penting adalah seberapa sering tas tersebut akan digunakan. Tas yang dapat dipakai untuk bekerja, bepergian, menghadiri acara, hingga aktivitas santai memiliki peluang cost per wear lebih rendah dibandingkan tas yang hanya cocok untuk satu kesempatan.

Loafers Hitam

Sepatu hitam dengan model klasik juga dapat menjadi pilihan yang relatif fleksibel. Loafers atau flat shoes dapat digunakan untuk wawancara kerja, bertemu pasangan, menghadiri acara keluarga, bepergian, hingga meeting bersama rekan kerja.

Model klasik membuatnya tidak terlalu bergantung pada siklus tren. Item seperti ini juga dapat menjadi alternatif ketika sneakers terasa terlalu kasual.

Vogue pada panduan wardrobe essentials 2026 memasukkan loafers dan sejumlah sepatu klasik sebagai bagian dari fondasi lemari yang dapat digunakan berulang kali.

Di Indonesia, sepatu dengan warna netral juga masih menjadi pilihan yang mudah dipadukan. Her World Indonesia sebelumnya mencatat sneakers putih sebagai salah satu basic fashion item karena fleksibel dikenakan bersama berbagai jenis pakaian. (far,ist/dya)

Setelah Lapas Mewahdari Hal 1

Pembongkaran fasilitas yang disebut sebagai “apartemen” di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selesai dilakukan Rabu (30/9/2026).

Sebanyak 10 unit bangunan diratakan menggunakan alat berat. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Mashudi memimpin langsung proses tersebut. “Total 10 (unit). Hari ini beres,” kata Mashudi.

Pembongkaran dilakukan setelah Komisi XIII DPR dan Kemenimipas menyepakati penertiban fasilitas tersebut menyusul temuan Ombudsman. Sebelum alat berat bekerja, pemerintah melakukan dokumentasi dan inventarisasi bangunan beserta barang-barang di dalamnya. Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan fasilitas itu dibangun secara swadaya, bukan menggunakan APBN, dan tidak tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN). Bangunan juga berada di kawasan aliran atau bantaran sungai yang tidak diperbolehkan untuk pembangunan.

Persoalan Cibinong tidak berhenti pada status bangunan. Rudi mengatakan pemeriksaan sementara telah menemukan adanya peristiwa penyalahgunaan wewenang yang masuk kategori pelanggaran disiplin berat berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021. Namun, pemerintah belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Penelusuran masih dilakukan untuk mengetahui siapa yang menempati, menggunakan, serta membiarkan fasilitas tersebut berdiri dan digunakan.

Temuan Ombudsman sebelumnya memperlihatkan fasilitas yang jauh berbeda dari gambaran hunian biasa di dalam lapas. Di sejumlah unit ditemukan sofa, televisi berukuran besar, pendingin udara, kulkas, meja makan, tempat tidur hingga peralatan olahraga.

Ketika Menteri Imipias Agus Andrianto dan Kepala Bappisus Aries



Berbagai barang pribadi yang ditemukan di klaster berfasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor. (Ist)

Marsudiyanto melakukan pemeriksaan pada 25 September, sebagian barang tersebut sudah tidak berada di lokasi. Pergerakan sejumlah barang kemudian menjadi bagian dari pemeriksaan internal, termasuk karena persoalan rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Ombudsman juga menemukan persoalan lain dalam pemeriksaan di lingkungan pemasyarakatan. Lembaga tersebut menyampaikan informasi mengenai dugaan pungutan Rp150.000 per minggu di salah satu blok di Lapas Cibinong. Di Rutan Pondok Bambu, Ombudsman memperoleh informasi mengenai dugaan pungutan Rp500.000 untuk pindah kamar dan Rp250 juta untuk membawa telepon seluler. Informasi tersebut masih berupa dugaan dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

Kemenimipas telah menonaktifkan lima pejabat Lapas Cibinong selama investigasi berlangsung. Mereka ialah Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Yoseph John Ferry, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Adi Nugroho Nur Wichaksono, serta Kepala Urusan Umum Deni Sugiarto.

Tim investigasi juga memeriksa 90 orang, terdiri atas 55 warga binaan dan 35 pegawai. Pemeriksaan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurai bagaimana fasilitas khusus tersebut dapat muncul dan digunakan di dalam lingkungan lapas.

Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto mengatakan temuan Cibinong akan menjadi bahan pembenahan sistem pemasyarakatan secara lebih luas. Pola pemeriksaan tersebut, kata dia, akan digunakan dalam upaya pembersihan terhadap 532 lapas dan rutan di Indonesia. Jika pemeriksaan menemukan unsur pidana, penanganan tidak akan berhenti pada pencopotan jabatan.

Komisi XIII DPR juga

akan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai hasil investigasi Kemenimipas. Sebelumnya, DPR meminta seluruh bukti fisik, termasuk pendingin udara, sofa dan televisi berukuran besar, didokumentasikan, dicatat dan diamankan sebelum pembongkaran. Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso mengatakan DPR belum dapat menyimpulkan hasil pemeriksaan karena investigasi masih berlangsung.

Bagi pengamat, persoalan utama justru dimulai setelah bangunan diratakan. Executive Director Center for Detention Studies Gatot Goei menilai penonaktifan pejabat belum cukup untuk menjawab bagaimana fasilitas khusus dapat muncul dan bertahan di lingkungan lapas. Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan kepemimpinan, pengawasan dan tata kelola pemasyarakatan.

Gatot meminta pemerintah menelusuri sumber pembiayaan fasilitas apabila pemeriksaan menemukan adanya pembelian atau pembangunan menggunakan uang dari pihak tertentu. Ia mendorong pelacakan transaksi dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya berfokus pada siapa yang menempati ruangan, tetapi juga siapa yang membiayai dan siapa yang menerima manfaat.

Ia juga mengingatkan pengawasan tidak semestinya baru menguat setelah lembaga eksternal menemukan persoalan. Menurut Gatot, pengawasan harus berjalan melalui mekanisme internal dan eksternal secara berkelanjutan agar penyimpangan tidak baru terlihat ketika Ombudsman atau lembaga lain melakukan pemeriksaan.

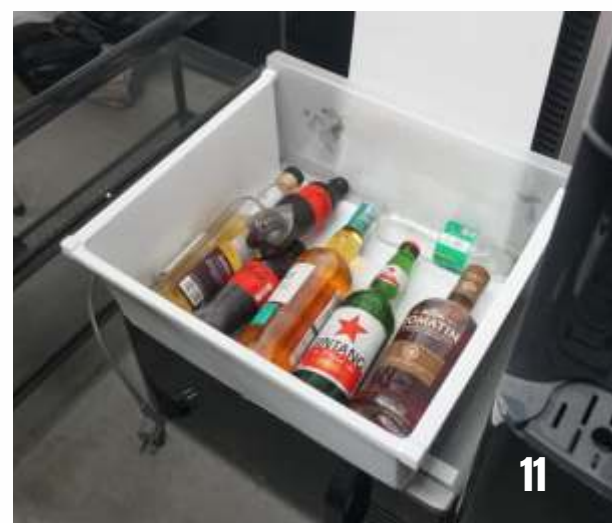
Gatot juga menyoroti aspek kepemimpinan dan meritokrasi. Menurut dia, pembenahan tidak cukup dengan mengganti pejabat setelah kasus mencuat. Rekam jejak pejabat, sistem penghargaan dan

hukuman, serta integritas dalam penempatan pimpinan perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Kritik serupa disampaikan Dadang Trisasongko dari Transparency International Indonesia. Ia mengibaratkan penonaktifan pejabat seperti “mengganti sementara sopir” kendaraan. Menurut dia, langkah tersebut belum menyentuh persoalan kelembagaan yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan berulang.

Dadang meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap risiko korupsi di lingkungan pemasyarakatan. Menurut dia, praktik jual-beli fasilitas dan kenyamanan dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari sel dengan fasilitas khusus, penggunaan perangkat elektronik, biaya kunjungan, pungutan untuk keluar lapas hingga fasilitas aktivitas di luar kewajaran. Audit tersebut, menurut dia, perlu menjadi dasar membangun sistem deteksi dan pencegahan korupsi.

Menurut Dadang, lapas merupakan bagian dari rantai penegakan hukum sehingga risiko penyalahgunaan kewenangan harus diperlakukan serius. Jika fasilitas dan kenyamanan dapat diperoleh melalui transaksi, perlakuan terhadap warga binaan berpotensi dipengaruhi kemampuan membayar. Karena itu, menurut dia, persoalan korupsi di lapas tidak semata-mata menyangkut persoalan internal lembaga. (wid,ist,rls,kum,tir/dya)



Kasus Dugaan Pemerasan WNA KPK TELUSURI UANG SETORAN SILMY KE DOSEN UNIBRAW

Penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Silmy Karim merambah Universitas Brawijaya (Unibraw). Penyidik menduga uang yang bersumber dari setoran di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi secara rutin diberikan Silmy kepada seorang dosen Unibraw selama menjalani bimbingan studi doctoral.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemberian tersebut diduga dilakukan berulang. "Bahwa diduga pihak tersangka (Silmy Karim) ini memberikan sejumlah uang secara rutin ketika melakukan bimbingan studi di Universitas Brawijaya. Pemberian uang dilakukan kepada saksi yang bersangkutan," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (30/9).

Diketahui, Dosen Program Studi Administrasi Publik Unibraw, Romy Hermawan, diperiksa KPK sebagai saksi pada Selasa (29/9/2026). Romy diperiksa terkait dugaan pemberian uang oleh Silmy dan tersangka lain, Bagus Bramantyo, ketika menjalani bimbingan program doctoral atau S-3.

Pemeriksaan terhadap Romy dilakukan untuk mengonfirmasi dan mendalami dugaan transaksi tersebut. Romy dipanggil dalam kapasitasnya sebagai calon promotor Silmy dan Bagus. KPK belum mengungkapkan berapa nilai uang yang diterima Romy karena jumlahnya masih dihitung penyidik.

Yang menjadi perhatian KPK bukan hanya pemberian uang kepada dosen tersebut. Penyidik juga menelusuri sumber uang yang diberikan Silmy. Menurut Budi, uang itu diduga berasal dari setoran yang masuk ke lingkungan Ditjen Imigrasi.

"Baik setoran-setoran yang terkait dengan layanan atau setoran dari bawah, itu kan ditampung menjadi uang taktis, di mana uang taktis itu di antaranya digunakan ya oleh SK ini untuk diduga diberikan kepada RM dalam kapasitas RM ini sebagai dosen di Universitas Brawijaya, dalam konteks bimbingan studi, bimbingan belajar yang dilakukan oleh SK," ujar Budi.

Dengan demikian, dugaan pemberian uang kepada dosen Unibraw tersebut ditempatkan KPK sebagai bagian dari penelusuran aliran dana perkara utama. Penyidik masih menghitung berapa total uang yang diberikan Silmy kepada Romy dan belum menyampaikan apakah seluruh pemberian memiliki nilai yang sama.

Aliran Uang Terus Dibongkar

Penelusuran sumber uang juga bergerak ke sejumlah kantor imigrasi di daerah. KPK sebelumnya mendalami dugaan setoran dari

Kantor Imigrasi di Bali dan menyatakan masih menelusuri besaran setoran serta biro jasa yang terkait.

KPK juga memeriksa sejumlah pihak swasta dalam perkara tersebut, termasuk pihak PT Artha Jaya Leonindo dan Presiden Komisaris Tempo Scan Group Handojo. Pemeriksaan terhadap Handojo antara lain berkaitan dengan dugaan pemberian uang serta tawaran fasilitas jet pribadi kepada Silmy. KPK menyatakan dugaan tersebut masih didalami penyidik.

Dalam perkembangan lain, KPK telah menyita aset dengan nilai total sekitar Rp150 miliar. Aset tersebut terdiri atas aset bergerak dan tidak bergerak, termasuk kendaraan serta tanah dan bangunan. Penyitaan aset kemudian menjadi salah satu objek yang dipersoalkan Silmy melalui praperadilan.

Praperadilan Silmy Ditolak

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (29/9) menolak permohonan praperadilan yang diajukan Silmy. Gugatan itu mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka sekaligus sejumlah tindakan penyitaan yang dilakukan KPK.

Silmy menggugat 15 surat yang diterbitkan KPK, termasuk dua surat perintah penyidikan tertanggal 3 Juni 2026, surat penetapan tersangka, surat penahanan, serta sejumlah berita acara penyitaan dan penggeledahan. Dalam permohonannya, pihak Silmy meminta hakim menyatakan tindakan tersebut tidak sah dan memerintahkan KPK menghentikan penyidikan.

Namun, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Yuliana menolak permohonan tersebut seluruhnya. Hakim antara lain mempertimbangkan bahwa penggeledahan KPK telah dilengkapi surat perintah dan berita acara, memperoleh persetujuan pengadilan negeri, serta telah diberitahukan kepada Dewan Pengawas KPK.

Putusan tersebut membuat proses penyidikan tetap berjalan. KPK masih memeriksa saksi, menelusuri aset, serta membongkar aliran uang yang diduga berasal dari pengurusan izin tinggal WNA.

Kasus ini bermula dari operasi

tangkap tangan KPK pada 2-3 Juni 2026 terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA. Dalam operasi tersebut, 17 orang diamankan, terdiri atas delapan penyelenggara negara atau aparat sipil negara dan sembilan pihak swasta yang diduga menjadi perantara pengurusan dokumen keimigrasian. Silmy kemudian mendatangi KPK pada 3 Juni untuk menyerahkan diri.

Sehari kemudian, KPK menetapkan delapan tersangka. Selain Silmy, mereka adalah Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam; Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra; Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah; Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tassar Bayu Setyaji; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo; Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi; dan staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

KPK menduga para tersangka memperoleh sedikitnya Rp145,5 miliar dari praktik tersebut selama periode 2022-2026. Uang itu diduga berasal dari WNA, biro jasa, maupun

sponsor yang mengurus permohonan izin tinggal. Penerimaan disebut dilakukan secara langsung, melalui transfer, maupun menggunakan perantara atau layering. (tin,ist,kum,ant/dya)

PRAPERADILAN SILMY KARIM DITOLAK

29 SEPTEMBER 2026

PN Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan Silmy Karim.

15 DOKUMEN KPK DIGUGAT

Meliputi penetapan tersangka, penyidikan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

PENYITAAN DINYATAKAN SAH

Hakim menilai prosedur penggeledahan dan penyitaan telah dipenuhi.

ASET RP150 MILIAR DISITA

Terdiri dari aset bergerak, kendaraan, tanah, dan bangunan.

RP145,5 MILIAR

KPK menduga uang terkumpul dalam perkara sepanjang 2022-2026.

Rp100 JUTA/PEKAN

KPK menduga Silmy menerima uang sebesar itu setiap pekan.

